

## **DAYA TANGGAP BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN DI KANTOR BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA**

**M Zaki Wafa**<sup>1\*</sup>, Februati Trimurni<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*Korespondensi : zakiwafa08@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pendekatan *New Public Management* membentuk pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan daerah dalam perencanaan pembangunan. Melalui daya tanggap Bappeda Kabupaten Pidie Jaya menjalankan proses pemerintahan daerah dan ajang demokrasi 5 tahunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya, kemampuan SDM Bappeda Kabupaten Pidie Jaya merespon usulan pembangunan masyarakat dan partisipasi dari pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya menjadi tujuan utama pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan dokumentasi. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan responsivitas lembaga publik menurut Agus Dwiyanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya tanggap Bappeda Kabupaten Pidie Jaya terjawab melalui pelaksanaan proses Musrenbang yang memberikan perwakilan masyarakat atau kepala desa mewakili usulan masyarakat desa. Keterbatasan waktu menjadi kendala utama karena tidak semua usulan pembangunan dapat tersampaikan oleh perwakilan masyarakat. Demi mendukung argumentasi usulan yang telah disampaikan, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya merespon secara inklusif melalui pemutakhiran data atau informasi antar SKPK, mempertimbangkan pendanaan daerah, dan mempertimbangkan visi dan misi Bupati Pidie Jaya atas kepentingan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

**Kata Kunci** : *New Public Management*; daya tanggap Bappeda; perencanaan pembangunan.

### **ABSTRACT**

*The New Public Management (NPM) approach shapes regional governments in identifying regional development needs during the planning process. Through its responsiveness, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Pidie Jaya Regency facilitates local governance and the democratic five-year process of drafting the Medium-Term Development Plan (RPJMK) for Pidie Jaya. This study primarily aims to evaluate the capacity of Bappeda's human resources to address community development proposals and stakeholder participation during the RPJMK preparation process. Using a qualitative case study method, data were collected through interviews, document analysis, and documentation, then analyzed descriptively based on Agus Dwiyanto's framework of public institution responsiveness. The findings indicate that Bappeda Pidie Jaya's responsiveness is reflected in implementing Musrenbang forums, where*

*community representatives or village heads convey development proposals. However, time constraints pose a significant challenge, as not all community proposals are adequately presented. To address this limitation, Bappeda Pidie Jaya adopts an inclusive approach by updating data and information across regional work units (SKPK), considering local funding capabilities, and aligning with the Regent of Pidie Jaya's vision and mission to prioritize regional development.*

**Keywords :** *New Public Management; Bappeda responsiveness; development planning.*

## A. PENDAHULUAN

Pengadopsian *New Public Management* di tahun 1980-an telah membentuk aktor politik sebagai arah penentu kebijakan publik yang mempengaruhi pembangunan daerah dengan memperkenalkan pendekatan *bottom-up* sehingga memberikan sikap kompetitif terhadap kebutuhan pembangunan daerah (Cole & Loughlin, 2003). Di Indonesia, penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya demi mempercepat proses pembangunan sehingga semua daerah dapat mengejar pembangunan tanpa ada yang tertinggal, karena anggaran dapat diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan lokal (Hajad et al., 2023). Artinya, setiap pemerintah daerah memiliki kesempatan mengagendakan arah pembangunan daerah melalui proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan orientasi daerah masing-masing.

Secara komprehensif, perencanaan pembangunan daerah mencakup arah pembangunan yang diakomodir oleh kepala daerah sesuai keselarasan asas-asas dan ketentuan hukum yang telah ditentukan negara. Dalam hal ini, peran aktor perencanaan pembangunan daerah di Indonesia berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (2) adalah "*Dalam penyelenggaraan perencanaan*

*pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda*". Namun disamping itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tidak semata-mata melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dengan sendirinya. Sesuai dengan amanat UU No.25 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) bahwa "*Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional*".

Kabupaten Pidie Jaya menjadi titik fokus dalam penelitian ini, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan untuk menjalankan otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Penyelenggaraan agenda penyusunan RPJMK merupakan bagian dari proses demokrasi dan proses kebijakan publik yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menarik perhatian peneliti untuk menelaah lebih jauh kehadiran *public responsiveness*. Karena, untuk mencapai sebuah kebijakan yang memenuhi kesesuaian dan keadaan masyarakat, dibutuhkan sebuah proses yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat (Tohopi et al., 2021). Proses penyusunan kebijakan tidak akan benar-

benar maksimal apabila pembuat kebijakan menyalahgunakan wewenang publik seperti mempromosikan kepentingan kelompok etnis, agama, politik, atau kelompok tertentu lainnya (Gans-Morse et al., 2014; Goetz, 2007). Dengan demikian, penyusunan RPJMK menjadi awal dari keberlangsungan melihat hipotesis gambaran hasil pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya.

Jika menelusuri rekam jejak pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya, perhelatan hasil proses kebijakan perencanaan pembangunan RPJMK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 belum dapat menggambarkan hasil perencanaan pembangunan dengan permasalahan pembangunan daerah seperti kemiskinan belum berdampak signifikan. Hasil perjalanan program pembangunan selama masa RPJMK Pidie Jaya Tahun 2019-2024 berketimpangan dengan persentase kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya sebesar 18.45% di tahun 2023 (BPS Aceh, 2024). Padahal pengendalian kemiskinan sangat berpengaruh oleh para pengambil kebijakan dalam memantau kemiskinan secara komprehensif (Putri et al., 2022).

Gambaran di atas menjadi dasar atas keterbelakangan daerah sehingga mendorong perhatian publik terhadap faktor-faktor apa yang menyebabkan keterbelakangan ini dan bagaimana peran kebijakan dalam menangani masalah ini secara efektif (Iammarino et al., 2019), serta dorongan kuat untuk melihat bagaimana *input*, *throughput*, dan *ouput* - terhadap legitimasi yang dijalankan oleh lembaga (Atalay, 2018). Tentunya, akan sangat menarik melihat dimensi Bappeda Kabupaten Pidie Jaya memahami secara menyeluruh arah pembangunan dan skala

prioritas program pembangunan yang disusun dalam RPJMK. Karena perencanaan pembangunan harus dirancang dengan tujuan meningkatkan kemampuan peluang secara keseluruhan demi mencapai hasil terbaik (Abreu et al., 2023).

Dengan kata lain, penentuan arah pembangunan daerah melalui penyusunan RPJMK, juga nilai-nilai menyusun kebijakan straregik. Secara historis, pendekatan strategis dalam perencanaan pembangunan diartikan sebagai pemahaman menyeluruh seputar masalah-masalah pembangunan yang saling berkorelasi dengan peran analisis pemangku kepentingan (Olejarski, 2011). Sehingga membutuhkan kemampuan Bappeda dalam dinamika, isu, dan isu strategis pembangunan daerah. Penafsiran penyusunan RPJMK Kabupaten Pidie Jaya terelaborasi dengan beragam kepentingan, seperti sinkronisasi arah pembangunan nasional, integrasi arah pembangunan Provinsi Aceh, penyesuaian anggaran daerah, skala prioritas pembangunan, berkoordinasi terkait proses pembangunan daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta yang terpenting keterlibatan berbagai kalangan masyarakat, akademisi, dan awak media pada proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya sesuai pendekatan *bottom-up*.

Akan sangat menarik diteliti, bagaimana Bappeda mengakomodir secara universal tantangan, peluang, dan pendanaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Kondisi ini menjadi bentuk perhatian mendalam terhadap keputusan yang dibuat mengarah kepada perumusan strategis. Hal ini menjadi perhatian luas dalam studi politik, lingkungan, dan pembangunan dikarenakan Bappeda, merupakan kunci

'kunci utama pada kelembagaan' sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah (Agnew, 2013; Willi et al., 2023). Hingga pada akhirnya, kebijakan yang disusun akan bergantung kembali dari sikap budaya administrasi, etika, norma dan perilaku pembuat kebijakan (Vigoda, 2000). Disini pula kinerja Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dapat terlihat dalam bertanggung jawab menjalankan proses penyusunan RPJMK sesuai dengan cita-cita daerah.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan mendeskripsikan secara sistematis daya tanggap Bappeda, yaitu bagaimana kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat (Dwiyanto, 2018). Melalui proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya, proses pembuatan kebijakan menjadi fokus utama untuk menilai sumber daya manusia Bappeda Pidie Jaya merealisasikan kebutuhan publik dan menjalankan kebijakan publik melalui penyusunan RPJMK Pidie Jaya. Artinya, orientasi dalam penelitian ini selaras dengan manajemen publik, melihat proses, bagaimana fungsi manajerial dan administrasi berlangsung, seperti kepemimpinan, kapasitas, media sosial, teknologi, dan partisipasi masyarakat (Bryer, 2021).

Hasil-hasil pembangunan yang bermasalah dan berpotensi memperlambat pembangunan dapat terentaskan apabila Bappeda Kabupaten Pidie Jaya pada proses penyusunan RPJMK memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pidie Jaya, termasuk mempertimbangkan usulan pembangunan seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat melalui partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang

RPJMK Pidie Jaya. Pada akhirnya, efektifnya suatu hasil proses pengambilan keputusan dapat digunakan untuk mengukur efektivitas institusi (Bäckstrand, 2006).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian menggunakan analisis dokumen, wawancara, serta dokumentasi. Wawancara terhadap *stakeholders* proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya menjadi inti penyajian data atas daya tanggap Bappeda Kabupaten Pidie Jaya memperhatikan seluruh pertimbangan dalam proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2019-2024. Penelitian ini akan memberikan perspektif terkait kapasitas Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dalam melibatkan masyarakat, mempertimbangkan usulan masyarakat, serta kesiapan SDM Bappeda dalam mengelaborasi hasil usulan dalam penyusunan RPJMK Pidie Jaya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini secara penuh mengintegrasikan pendelakatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam suatu program, suatu peristiwa, suatu aktivitas, sebuah proses, atau satu atau lebih individu (Creswell & Creswell, 2017). Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penguatan investigasi yang berguna untuk menganalisis berbagai tren topik penelitian, perkembangan jumlah penelitian, dan variasi publikasi dari berbagai sumber yang memiliki kedalaman teoritis dari para ahli mengenai responsivitas lembaga publik. Metode studi kasus dapat memperdalam investigasi terkait kasus tertentu. Studi kasus berpusat pada proses penyusunan RPJMK Pidie

Jaya Tahun 2019-2024 dengan mengumpulkan data secara wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data Primer didapatkan dari wawancara *purposive sampling* melalui Plt. Kepala Bappeda Pidie Jaya, Anggota Tim Penyusunan RPJMK Pidie Jaya 2019-2024, serta dokumentasi dilakukan dengan melacak pada hasil artikel berita, laporan riset, hasil kajian pemerintah, dan hasil kajian LSM. Analisis data dilakukan dengan model Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Analisis ini dilakukan untuk mengkaji proses penilaian kinerja atau daya tanggap Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dalam menanggapi usulan masyarakat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Daya tanggap Bappeda Pidie Jaya dalam penyusunan RPJMK sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip manajemen publik yang efektif, khususnya melalui pendekatan NPM. Sebagai aktor utama perencanaan pembangunan, penyusunan RPJMK memberikan makna yang mencerminkan tanggapnya Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dalam mengalokasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat dan menyeluruh mengidentifikasi penyusunan program pembangunan. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2019-2024 mencerminkan sebuah perjalanan dinamis yang melibatkan pembangunan yang bersifat *bottom up*, berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan. Perencanaan *bottom up* telah menjadi andalan dan populer dari inisiatif pembangunan dan

menawarkan peluang untuk partisipasi oleh para penerima manfaat pembangunan (Wangchuk & Turner, 2019). Oleh karenanya, keterlibatan berbagai kalangan masyarakat menjadi unsur utama untuk menjawab daya tanggap Bappeda ini. Meskipun begitu, proses utama yang mendasari penyusunan RPJMK turut dijalankan secara sistematis. Dimulai dengan rancangan teknokratik, rancangan awal RPJMK, rancangan langkah kedua rancangan RPJMK, dan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan Bapak Rahmat, S.T., M.Si. sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) sekaligus Anggota Tim Penyusunan RPJMK, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya harus mampu menyusun RPJMK paling lambat 6 bulan setelah Bupati Kabupaten Pidie Jaya dilantik:

*"Kita diberikan waktu 6 bulan untuk bisa menyelesaikan RPJM. Dalam 6 bulan itu, disitu harus terlaksanakan forum konsultasi publik, FGD-FGD bersama SKPK, menampung usulan melalui proses Musrenbang, Musrenbang RPJMD namanya". (Wawancara 4 Juli 2023).*

Mengenai hal di atas, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya tidak sekedar berkerja secara internal menyelesaikan penyusunan RPJMK. Keterlibatan teknokrat menjadi pondasi yang mendukung Bappeda dalam mengidentifikasi rancangan program sehingga forum konsultasi publik dan partisipasi akademisi dari universitas di provinsi Aceh berkerja sebaik mungkin.

Setelah melewati proses rancangan teknokrat, penyusunan rancangan awal RPJMK, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal

52 ayat (2) huruf b, tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan yang komprehensif dan siap untuk ditetapkan. Di sinilah pengolahan data, analisis kondisi daerah, dan identifikasi permasalahan pembangunan menjadi langkah awal yang krusial.

Berdasarkan wawancara bersama Plt. Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, Bapak T. Muhalil, S.E., M.Si, Ak.:

*"Dia (Bappeda) ranahnya perencanaan, menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat sehingga prioritas pembangunan yang diusulkan masyarakat untuk dituangkan dalam perencanaan, sehingga lahirnya dokumen" (Pak M, Wawancara 5 Juli 2023).*

Pada tahap rancangan awal RPJMK, bentuk keluhan masyarakat dapat menghasilkan dokumen perencanaan awal apabila sesuai dengan prioritas pembangunan. Hal ini berkaitan dengan opini publik yang diselenggarakan seperti *Forum Group Discussion (FGD)*, atau pandangan Bappeda terhadap isu-isu di masyarakat. Keluhan masyarakat menjadi ketentuan yang harus diperhitungkan dalam menyusun RPJMK, untuk itu Bappeda Kabupaten Pidie Jaya membentuk kelompok atau pembagian tugas manajerial dalam merespon keluhan masyarakat ini. Hasil observasi, pengorganisasian terhadap pegawai Bappeda menghasilkan sebuah Tim Penyusun RPJMK. Namun, untuk klasifikasi pembagian tupoksi tugas oleh Tim Penyusun RPJMK tidak dapat dideskripsikan secara spesifik.

Untuk melakukan penyusunan awal RPJMK, Bappeda tidak berperan sendiri menyusun program-program pembangunan, mereka menjalin koordinasi yang sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi isu dan peluang

pembangunan dari berbagai sektor. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Bapak Rahmat, S.T., M.Si. sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) sekaligus Anggota Tim Penyusun RPJMK bahwa:

*"Ketua Kepala Bappeda, jadi kita lain anggota tim. Anggota banyak dan termasuk yang utama dari bappeda dan melibatkan dinas-dinas lain yang terkait, rata-rata semua dinas termasuk kepala SKPK nya karena mereka menyuplai data, kemudian ya dari pak Sekda, asisten juga masuk. Kalau masyarakat, timnya itu tidak masuk, tapi masyarakat itu bagian dari masukan saran" (Wawancara 4 Juli 2023).*

Koordinasi yang terjalin dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengoptimalkan kesadaran akan pentingnya penyusunan RPJMK mempertimbangkan kehendak-kehendak pembangunan daerah. Sehingga pada proses penyusunan rancangan awal RPJMK, setiap rancangan program pembangunan berpedoman pada aspek visi dan misi Bupati, lalu disesuaikan dengan data atau temuan pendukung oleh SKPK yang menjadi informasi atau dasar yang membelakangi setiap rancangan program. Namun, tantangan muncul saat data atau informasi yang digunakan untuk menyusun program-program ini tidak selalu mutakhir, menciptakan jurang komunikasi yang mengganggu kelancaran proses. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi penghalang dalam mengoptimalkan koordinasi lintas SKPK, hasil wawancara Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya:

*"Hambatan pertama seperti tadi, pertama mungkin soal data-data yang terkadang perlu di update ya kan, kemudian ada data-data yang baru, indikator-indikator yang memang baru yang diamankan sesuai dengan*

*peraturan. Itu yang belum tersajikan oleh instansi yang memang punya kontributor terhadap data tersebut. Alasannya bermacam-macam juga, kekurangan anggaran, tidak ada sumber daya lagi yang bisa menghitung bagaimana sebuah karena yang diminta indeks ini indeks ini. Indeks itu butuh melakukan survei, ada prosedurnya juga. Sehingga data-data itu tidak dapat tersajikan" (Pak M, Wawancara 5 Juli 2023).*

Meskipun demikian, komitmen Bappeda Kabupaten Pidie Jaya setelah menyusun rancangan awal, proses rancangan tahap kedua merupakan bagian untuk memberikan haluan terhadap rencana pembangunan selama 5 tahun yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Pidie Jaya. Pada proses ini, setiap SKPK menyusun rancangan strategis (Renstra) sebagai dokumen pendukung untuk melakukan sinkronisasi dengan program pembangunan pada rancangan RPJMK.

Kemudian, Musrenbang RPJMK hadir sebagai wadah aspirasi masyarakat, tempat di mana suara rakyat berinteraksi dengan penyusunan kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 65 berbunyi "*untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD*", artinya Musrenbang sebagai proses dimana RPJMK yang telah disusun Tim Penyusun RPJMK untuk dibahas dan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Suatu perencanaan pembangunan pada hakikatnya membutuhkan pertimbangan seksama berupa potensi, faktor eksternal, serta pihak berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya.

Namun, tidak semua suara dapat dijangkau secara keseluruhan. Meski

Bappeda telah menerapkan prinsip perencanaan "*bottom-up*", keterbatasan dalam menjangkau semua usulan masyarakat di tingkat desa menjadi sorotan. Para perwakilan masyarakat yang terpilih untuk memberikan usulan pembangunan ditingkat daerah memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan secara resmi mendukung rencana pembangunan (Wangchuk & Turner, 2019). Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, S.T., M.Si. sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) sekaligus Anggota Tim Penyusun RPJMK:

*"Kita undang-lah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, tidak mungkin juga kita undang 222, tempat terbatas dan waktu singkat. Paling tokoh-tokohnya saja mewakili mungkin dua orang per kecamatan yang bisa memberikan ide-ide masukan saran, untuk kesempurnaan dokumen"(Pak R, Wawancara 4 Juli 2023).*

Hal ini mendasari bahwa kehadiran tokoh-tokoh tertentu di Musrenbang RPJMK sering kali memengaruhi arah usulan yang diajukan. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi Bappeda untuk menjaga keadilan dalam proses perencanaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa usulan masyarakat secara luas tidak seluruhnya mampu ditanggapi, mengingat keterbatasan waktu dan kepentingan perwakilan tokoh masyarakat yang hadir pada pelaksanaan Musrenbang RPJMK.

Di lain sisi, sebagai akselerator dalam penyusunan RPJMK, Musrenbang RPJMK telah melibatkan berbagai *stakeholder*. Musrenbang menjadi ruang dialog, di mana perwakilan masyarakat, SKPK, dan Bappeda berdiskusi untuk merumuskan prioritas pembangunan.

Meskipun proses ini sudah memenuhi regulasi, tantangan tetap ada, dan Bappeda perlu menajamkan tanggapan terhadap masukan yang diberikan, terutama yang berasal dari SKPK terkait. Keterlibatan SKPK dalam Musrenbang menjadi kunci dalam mengidentifikasi program-program yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan. Menjaring tanggapan terhadap pembangunan atas penyampaian dan pembahasan kegiatan atau pengevaluasian kebijakan atau program sebelumnya, identifikasi kendala pembangunan, serta menelaah manfaat program yang telah terlaksana.

Pada pembahasan program pembangunan, Bappeda dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain berdasarkan masukan dari berbagai pihak membantu Bappeda memahami perspektif yang beragam dan memastikan rencana yang lebih inklusif, terutama dengan usulan yang berasal dari SKPK terkait. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan Bapak Rahmat, S.T.,M.Si. bahwa usulan antar SKPK akan dikoordinir dan membantu proses identifikasi permasalahan yang ada:

*"Tentunya di SKPK banyak juga jenisnya, misalkan di tani, ada dinas pertanian, kelompok tani. Ada nelayan itu bagian dinas kelautan dan perikanan, itu mereka yang bertugas mengidentifikasi. Setiap ada Musrenbang, SKPK terkait pasti hadir dan kelompok ini hadir untuk menyampaikan. Semuanya terlibat, SKPK ini bagian dari teknisnya, kita kebijakan, kita atur panjang jalan, tapi yang eksekusi dinas, Bappeda hanya komitmen saja meminta kepada ke SKPK" (Pak R, Wawancara 4 Juli 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hadirnya SKPK dalam Musrenbang RPJMK akan membantu mendapatkan identifikasi program pembangunan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan segala aspek bidang seperti pertanian, kelautan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, pendekatan pembangunan yang terjalin di Kabupten Pidie Jaya dengan proses Musrenbang menjadi proses inti menilai kinerja lembaga pemerintah daerah dalam menyusun program-program pembangunan. Atas dasar pertimbangan dan kesepakatan bersama, proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya dapat menghasilkan arah pembangunan selama 5 tahun. Namun komitmen pembangunan berkelanjutan menjadi pertanyaan lanjut pada penelitian kedepannya. Pada penelitian ini, hasil kinerja atau daya tanggap Bappeda Kabupaten Pidie Jaya terfokus dengan kesiapan internal lembaga dalam menyiapkan proses penyerapan wawasan dan masukan dari berbagai elemen di masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

Setelah melakukan wawancara bersama pihak Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, secara singkat Bappeda Kabupaten Pidie Jaya mencoba melakukan peninjauan terhadap usulan pembangunan, menciptakan hubungan yang erat antara aspirasi masyarakat dan realisasi program. Upaya ini semakin diperkuat dengan kehadiran Tim Penyusun RPJMK yang berkomitmen untuk turun ke lapangan, melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melalui wawancara dan, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya berupaya mengumpulkan data dan informasi untuk memastikan bahwa setiap

usulan diperhatikan dengan cermat:

*"Kalau menyangkut dengan layak tidak usulan masyarakat itu wajib turun ke lapangan. Kita disini sini ada beberapa bidang, misalnya ada tentang perekonomian sarana prasarana, sosial budaya atau keistimewaan. Kalau misal menyangkut dengan pendidikan atau kesehatan ada bidang perencanaan sosial budaya, kemudian menyangkut dengan jalan infrastruktur apa misalnya kan. Itu ada bidang sarana prasarana. Kemudian menyangkut dengan perekonomian pertanian segala macam, ada dibidang itu. Itu hasil Musrenbang wajib turun bersama bidang teknis" (Pak T, Wawancara 5 Juli 2023).*

Hal di atas menjadikan keterlibatan Bappeda dalam menanggapi setiap isu strategis pembangunan diakui sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 59 huruf (d). Analisis mendalam terhadap kondisi lapangan menjadi hal yang tidak boleh diacuhkan demi penyusunan RPJMK yang tepat sasaran.

Dengan mengintegrasikan manajemen strategis dan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, Bappeda dapat meningkatkan kinerjanya dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini akan memungkinkan Bappeda untuk berperan lebih aktif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya.

Apakah semua usulan pembangunan harus dipenuhi dalam penyusunan RPJMK oleh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya? Jawabannya tentu tidak. Sangat sulit untuk menggapi secara keseluruhan. Seperti contoh, biaya pengobatan, haruskah

pemerintah turun tangan untuk membantu?

Ketika penjara penuh dengan narapidana, haruskah pemerintah membebaskan sebagian dari mereka dan memberikan ruang bagi yang lain? Menanggapi masalah-masalah moral semacam ini tidaklah mudah (Vigoda, 2000). Tentunya, setiap usulan memiliki pertimbangan tertentu yang diatur dalam menjalankan proses demokrasi pada usulan pembangunan penyusunan RPJMK Pidie Jaya oleh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya.

Dari hasil wawancara, untuk menjalankan pendekatan *bottom up*, meskipun tidak seluruh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya terlibat dalam proses penyusunan RPJMK mengingat batasan kondisi dan waktu, keterwakilan kepala desa menjadi salah satu bentuk perwakilan masyarakat yang diindahkan oleh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya. Dan hal tersebut, usulan yang diperoleh dari perwakilan kepala desa tidak seluruhnya dapat dipenuhi secara keseluruhan. Terlebih lagi, meskipun kepala desa hadir sebagai perwakilan, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengatur rancangan program dikarenakan bukan dari bagaian Anggota Tim Penyusun RPJMK. Meskipun begitu, kehadiran kepala desa menjadi sangat penting dalam manajemen publik, faktor eksternal memiliki pengaruh besar, jika kapasitas masyarakat yang hadir sebagai perwakilan masyarakat pada proses Musrenbang memiliki pemahaman yang tinggi akan isu pembangunan, hal tersebut dapat mendukung pertimbangan terbaik pada proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya. Akan tetapi untuk mengukur kapasitas eksternal seperti mengukur pemahaman mendalam dari perwakilan masyarakat memakan waktu dan membutuhkan tindakan lanjutan. Sehingga

penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mendalami proses manajerial Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dalam mengakomodir keterwakilan masyarakat dan mengukur pemahaman masyarakat terhadap proses penyusunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2019-2024. Untuk merefleksikan pelaksanaan penyusunan RPJMK, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam RPJMK Pidie Jaya sangat bias dengan keterbatasan waktu, informasi, proses politik dan sumber daya. Sehingga Bappeda Kabupaten Pidie tidak mampu menampung seluruh isu pembangunan yang diangkat masyarakat secara komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara, ketersediaan waktu untuk mengatur segala proses penyusunan RPJMK menjadi pertimbangan Bappeda dalam menyusun rancangan, apabila proses penyerapan usulan, data, dan informasi tidak didapatkan secara menyeluruh, proses penyusunan rancangan harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Disisi lain, untuk mendukung seluruh usulan dari berbagai pihak, penyaluran ruang komunikasi yang terjalin dengan SKPK sudah berjalan untuk mengangkat isu-isu pembangunan, namun penilaian terhadap data atau indikator tertentu dalam mencapai standarisasi program pembangunan juga menjadi penghalang untuk mengelaborasi pemahaman apakah setiap rancangan program pembangunan yang akan disusun dalam RPJMK berpengaruh signifikan atau tidak.

Pertanyaan yang menjadi jawaban atas daya tanggap Bappeda Kabupaten

Pidie Jaya pada proses penyerapan aspirasi atau usulan dari masyarakat sudah memasuki pada tahap manajerial. Dari pengembangan kualitas manajemen dan kepemimpinan telah mempengaruhi sukses atau tidaknya dalam menjalankan suatu lembaga (Vigoda, 2000). Bukanlah nihil untuk menemukan solusi dengan keterbatasan yang terjadi. Secara teknis, setiap bidang yang ada di Bappeda Kabupaten Pidie Jaya ditugaskan untuk menganalisis kondisi lapangan setiap rancangan program pembangunan. Hal ini dengan membuktikan upaya setiap bidang mampu mempertimbangkan rancangan program pembangunan yang disusun telah dianalisis sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.

Setelah melewati fase Forum Konsultasi Publik, *Forum Group Discussion (FGD)*, hingga Musrenbang, apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang perlu ditanggapi oleh Bappeda Kabupaten Pidie Jaya memiliki alur yang sangat panjang. Terkhusus, Musrenbang RPJMK Pidie Jaya menjadi momen penting yang melampaui batasan teknis semata. Musrenbang bukan hanya pemberian wadah komunikasi semata, melainkan dengan kehadiran SKPK dan tokoh masyarakat membuktikan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya menjalankan prinsip demokrasi yang mengakomodir dan membantu menyelesaikan rancangan program pembangunan yang disusun dalam RPJMK Pidie Jaya.

Secara terang membuka mata bahwa Bappeda Kabupaten Pidie Jaya menjadikan Musrenbang sebagai ajang dimana komunikasi lebih terbuka dan inklusif terjadi. Di sinilah Bappeda berupaya menembus keterbatasan yang ada,

menghadirkan harapan masyarakat langsung ke meja perencanaan dan menjembatani usulan masyarakat dengan rancangan kebijakan pembangunan. Dari segi pemerintah daerah, meskipun penyusunan RPJMK Pidie Jaya merupakan hasil dari pedoman visi dan misi Bupati Pidie Jaya, pelaksanaan Musrenbang RPJMK akan menjadi sebuah pondasi untuk membangun kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya demi mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Kedepannya, jika perhatian kita dapat terus memantau laju pemerintah daerah seperti dalam penelitian ini, dengan daya tanggap Bappeda Kabupaten Pidie Jaya dalam mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, tidak mustahil untuk menciptakan perencanaan yang lebih responsif dan inklusif sebagai langkah awal menuju perubahan dan kemajuan daerah.

#### **D. KESIMPULAN**

Ketentuan kebijakan yang telah dijalankan melalui perencanaan pembangunan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2019-2024 dapat dijadikan landasan bahwa besarnya daya tanggap lembaga publik mampu mendukung keterlibatan masyarakat dan mengenal urgensi pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya. Daya tanggap Bappeda merespon berbagai informasi dan usulan dengan melibatkan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), akademisi perencana melalui forum konsultasi publik, Forum Group Discussion (FGD), Rancangan Teknokratik dan Musrenbang RPJMK menjadi poros utama bahan pertimbangan penyusunan RPJMK.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2019-2024 menggambarkan kompleksitas dan dinamika dalam merumuskan rencana pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun Bappeda Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan upaya maksimal untuk melibatkan berbagai pihak melalui Musrenbang, tantangan tetap muncul, terutama dalam menjangkau semua aspirasi masyarakat di tingkat desa.

Keterbatasan dalam pengolahan data dan koordinasi lintas SKPK menjadi penghalang dalam menciptakan rencana yang ideal. Namun, dengan komitmen untuk terus mendengarkan suara masyarakat dan melibatkan SKPD dalam proses perencanaan, Bappeda menunjukkan kesiapan untuk merespons tantangan yang ada. Musrenbang bukan hanya sekadar ajang formal, tetapi merupakan jembatan antara harapan rakyat dan realisasi program pembangunan.

Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan, serta analisis mendalam terhadap isu-isu strategis, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya berpotensi untuk merumuskan RPJMK yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kedepannya, penting bagi Bappeda untuk terus mengoptimalkan kinerja dan memanfaatkan sumber daya secara efektif agar setiap usulan pembangunan dapat terwujud dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

Abreu, M., Comim, F., & Jones, C. (2023). A capability-approach perspective

- on regional development. In *Regional Studies*. Routledge. <https://doi.org/10.1080/00343404.2023.2276332>
- Agnew, J. A. (2013). Arguing with Regions. *Regional Studies*, 47(1), 6–17. <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.676738>
- Astlethner, F., & Hamendiger, A. (2003). Urban Sustainability as a New Form of Governance: Obstacles and Potentials in the Case of Vienna 1. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 16(1), 51–75. <https://doi.org/10.1080/13511610304510>
- Atalay, Y. (2018). Understanding Input and Output Legitimacy of Environmental Policymaking in The Gulf Cooperation Council States. *Environmental Policy and Governance*, 28(1), 39–50. <https://doi.org/10.1002/eet.1794>
- Bäckstrand, K. (2006). Multi-stakeholder partnerships for sustainable development: Rethinking legitimacy, accountability and effectiveness. *European Environment*, 16(5), 290–306. <https://doi.org/10.1002/eet.425>
- Bryer, T. A. (2021). Handbook of Theories of Public Administration and Management. In *Handbook of Theories of Public Administration and Management*. Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781789908251>
- Chua Chow, C., & Sarin, R. K. (2002). Known, Unknown, and Unknowable Uncertainties. *Theory and Decision*, 52(2), 127–138. <https://doi.org/10.1023/A:1015544715608>
- Cole, A., & Loughlin, J. (2003). Beyond the unitary state? Public opinion, political institutions and public policy in Brittany. *Regional Studies*, 37(3), 265–276. <https://doi.org/10.1080/003434003200065424>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Davies, J., & Imbroscio, D. (2009). *Theories of Urban Politics* (2nd ed.). <https://doi.org/10.4135/9781446279298>
- Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The Quality of Democracy: An Overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0060>
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. UGM press.
- Gans-Morse, J., Mazzuca, S., & Nichter, S. (2014). Varieties of Clientelism: Machine Politics during Elections. *American Journal of Political Science*, 58(2), 415–432. <https://doi.org/10.1111/ajps.12058>
- Goetz, A. M. (2007). Manoeuvring past clientelism: Institutions and incentives to generate constituencies in support of governance reforms. *Commonwealth and Comparative Politics*, 45(4), 403–424. <https://doi.org/10.1080/14662040701659845>
- Hajad, V., Ikhsan, I., Herizal, H., Latif, I.

- R., & Mafanda, N. (2023). Poverty and the Curse of Natural Resources in Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(1), 41–58. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i1.92>
- Hartley, J., Ongaro, E., Quick, K., & Schröter, E. (2023a). Public management and policing: a dialectical inquiry. In *Public Management Review* (Vol. 25, Issue 9, pp. 1711–1729). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2224809>
- Hartley, J., Ongaro, E., Quick, K., & Schröter, E. (2023b). Public management and policing: a dialectical inquiry. In *Public Management Review* (Vol. 25, Issue 9, pp. 1711–1729). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2224809>
- Howlett, M. (2022). Avoiding a Panglossian Policy Science: The Need to Deal with the Darkside of Policy-Maker and Policy-Taker Behaviour. *Public Integrity*, 24(3), 306–318. <https://doi.org/10.1080/10999922.2021.1935560>
- Iammarino, S., Rodriguez-Pose, A., & Storper, M. (2019). Regional inequality in Europe: Evidence, theory and policy implications. *Journal of Economic Geography*, 19(2), 273–298. <https://doi.org/10.1093/jeg/lby021>
- Logan, D. C. (2009). Known knowns, known unknowns, unknown unknowns and the propagation of scientific enquiry. *Journal of Experimental Botany*, 60(3), 712–714. <https://doi.org/10.1093/jxb/erp043>
- Mappasiara, M. (2018). Manajemen Strategik Dan Manajemen Operasional Serta Implementasinya Pada Lembaga Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1), 74–85. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i1.5116>
- Olejarski, A. M. (2011). Public Good as Public Interest?: The Principle of Tangibility in Eminent Domain Legislation. *Public Integrity*, 13(4), 333–352. <https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922130403>
- Ordóñez, C., Threlfall, C. G., Livesley, S. J., Kendal, D., Fuller, R. A., Davern, M., van der Ree, R., & Hochuli, D. F. (2020). Decision-making of municipal urban forest managers through the lens of governance. *Environmental Science & Policy*, 104, 136–147. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.11.008>
- Paddison, B., & Walmsley, A. (2018). New Public Management in tourism: a case study of York. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(6), 910–926. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1425696>
- Putri, S. R., Wijayanto, A. W., & Sakti, A. D. (2022). Developing Relative Spatial Poverty Index Using Integrated Remote Sensing and Geospatial Big Data Approach: A Case Study of East Java, Indonesia. *ISPRS International Journal of Geo-*

- Information*, 11(5), 9387889  
<https://doi.org/10.3390/ijgi11050275>
- Reussner, E. M. (2003). Strategic management for visitor-oriented museums: A change of focus. *International Journal of Cultural Policy*, 9(1), 95–108.  
<https://doi.org/10.1080/1028663032000089868>
- Ribeiro-Navarrete, B., López-Cabarcos, M. Á., Piñeiro-Chousa, J., & Simón-Moya, V. (2023). The moment is now! From digital transformation to environmental performance. *Venture Capital*, 1–36.  
<https://doi.org/10.1080/13691066.2023.2249231>
- Rölle, D. (2017). What Makes Citizens Satisfied? The Influence of Perceived Responsiveness of Local Administration on Satisfaction with Public Administration. In *Journal of Social and Administrative Sciences* [www.kspjournals.org](http://www.kspjournals.org) (Vol. 4). [www.kspjournals.org](http://www.kspjournals.org)
- Ryan, S., Connell, J., & Burgess, J. (2017). Casual academics: a new public management paradox. *Labour & Industry*, 27(1), 56–72.  
<https://doi.org/10.1080/10301763.2017.1317707>
- Sembiring, M. (2011). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Organisasi Pelaksana Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII.
- Smith, P. (1995). Performance indicators and outcome in the public sector. *Public Money and Management*, 15(4), 13–16.  
<https://doi.org/10.1080/0954096950>
- Sugiyono. (2018). *Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) dengan 9 Desain*. Cv.Afabeta.
- Thompson, D. F. (1992). Paradoxes of government ethics. *Public Administration Review*, 3(52), 254–259.
- Tohopi, R., Nani, Y. N., & Aneta, Y. (2021). Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154.  
<https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916>
- Tom Liou, K. (2000). Applying strategic management to economic development: benefits and challenges. *International Journal of Public Administration*, 23(9), 1621–1649.  
<https://doi.org/10.1080/01900690008525517>
- Van Gramberg, B., & Teicher, J. (2000). Managerialism in local government – Victoria, Australia. *International Journal of Public Sector Management*, 13(5), 476–492.  
<https://doi.org/10.1108/0951355000350869>
- Vigoda, E. (2000). Are You Being Served? The Responsiveness of Public Administration to Citizens’ Demands: An Empirical Examination in Israel. *Public Administration*, 78(1), 165–191.  
<https://doi.org/10.1111/1467-9299.00198>
- Vigoda, E. (2002). From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of

- Public Administration. *Public Administration Review*, 62(5), 527–540. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00235>
- Vigoda-Gadot, E., & Vashdi, D. R. (Eds.). (2020). *Handbook of Research Methods in Public Administration, Management and Policy*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781789903485>
- Wangchuk, D., & Turner, M. (2019). Aligning top-down and bottom-up in development planning: The case of Bhutan. *Public Administration and Development*, 39(2), 59–68. <https://doi.org/10.1002/pad.1848>
- Willi, Y., Pütz, M., & Jongerden, J. (2023). Unpacking legitimacy in regional development: asymmetric justification and the functioning of regional development agencies. *Territory, Politics, Governance*, 11(1), 158–173. <https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1805352>
- Williams, W., & Lewis, D. (2008). Strategic management tools and public sector management: The challenge of context specificity. *Public Management Review*, 10(5), 653–671. <https://doi.org/10.1080/14719030802264382>
- Worrall, L., Collinge, C., & Bill, T. (1998). Managing strategy in local government. *International Journal of Public Sector Management*, 11(6), 472–493. <https://doi.org/10.1108/09513559810246354>